



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Salido Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/38/C.IV.J/X/2023

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

Membaca : 1. Surat Wali Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai Nomor :900/217/SP/WN-SSL/X/2023 tanggal tiga bulan oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja /APB Nagari Tahun Anggaran 2023;

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;

c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2023;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 130);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 16);
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Tahun 2023 Nomor);
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariak Lumpo;
- KEDUA** : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO
Pada tanggal : 03 Oktober 2023

CAMAT IV JURAI

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Sungai Sariak Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/038/C.IV.J/X/2023

TANGGAL : 03 OKTOBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NAGARI SUNGAI
SARIK LUMPO NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

I. Pendapatan sebesar Rp. 1.264.680.851,00.- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.249.720.851,00
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	Rp.	14.960.000,00

II. Belanja sebesar Rp. 1.277.423.706,11.- dengan rincian :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	543.846.657,11
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	318.781.349,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	57.642.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	282.153.700,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari	Rp.	75.300.000,00

III. Pembiayaan sebesar Rp. 12.742.855,11.- dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	12.742.855,11
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2023, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2023 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo tentang Perubahan APB Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.836.342,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah

sebesar Rp. 3.102.491,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.233.405,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 2.500.446,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2023.

4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo tentang Perubahan APB Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 802.308.000,00 berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
 5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN sebesar Rp. 437.576.509,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 14.960.000,00.- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 800.000,00.- dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebesar Rp. 9.600.000,00.- Pot 1% BPJS dari penerima upah, Wali Nagari dan Perangkat sebesar Rp. 2.760.000,00.- dan Potongan PBB-P2 dari Kepala Kampung sebesar Rp. 1.800.000,00.- telah disesuaikan dengan perhitungan yang relevan.
- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah

Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022

tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp	36.000.000,00
*Tunjangan Wali Nagari	Rp.	15.000.000,00
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 289.225.000,00 yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	218.775.000,00
*Tunjangan Perangkat Nagari	Rp	70.450.000,00
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 8.398.020,00 yang terdiri dari :

*Jaminan Kesehatan Wali Nagari	Rp.	360.000,00
*Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari	Rp.	2.481.600,00
*Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari	Rp.	2.246.400,00
*Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat	Rp.	3.310.020,00
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari
 5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari
 6. Penyediaan Operasional Bamus
 7. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa
 - B. Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :
 1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran
 2. Pemeliharaan Gedung/Sapras Kantor
 - C. Pada Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :
 1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Nagari
 2. Pemutakhiran Data SDGs Nagari

- D. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Rp. 4.665.000,00
Perencanaan Nagari/Pembahasan APB
Nagari(reguler)
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Rp. 12.747.500,00
Lainnya (Musnag, rembug kampung non
reguler) :
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari Rp. 7.189.000,00
(RPJMNagari/RKPNagari)
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Rp. 6.182.600,00
(APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll :
 5. Penyusunan Dokumen Kebijakan Nagari Rp. 765.000,00
 6. Penyusunan Pelaporan Kepala Desa Rp. 1.656.000,00
- E. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
1. Pengembangan Sitem Infomasi Desa Rp. 13.200.000,00
 2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 2.100.000,00
Nagari (Sosialisasi Produk Hukum Nagari)
 3. Dukungan Sosial Pelaksanaan Pemilihan Rp. 8.030.000,00
Bamus Nagari
- F. Pada Sub Bidang Pertanahan :
1. Administarsi Pajak Bumi dan Banguanan Rp. 2.444.000,00
- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :
- A. Pada Sub Bidang Pendidikan
1. Penyelenggaraan PAUD dan TPQ Rp. 48.660.000,00
- B. Sub Bidang Kesehatan :
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari Rp. 22.060.000,00
 2. Penyelenggaraan Posyandu Balita, Lansia Rp. 50.300.000,00
 6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 23.120.500,00
 8. Pembinaan dan Operasional Kader PMR Rp. 10.260.000,00
 9. Penyediaan Saprass Kesehatan (Peralatan) Rp. 2.000.000,00
 9. Pembinaan dan operasional Kader Rp. 7.000.000,00
Dasawisma
3. Pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Lanjutan Pembangunan JUT Solok Minok Rp. 102.159.849,00
 Pada Kegiatan ini untuk melaksanakan padat karya tunai yang mana untuk upah min 50% dari belanj fisik sesuai dengan permendes no 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023.
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman :
 1. Pembangunan Jamban Masyarakat Miskin Rp. 44.000.000,00
 (DTKS, P3KE)
 2. Penyelenggaraan Verlap Proklamasi 2023 Rp. 5.101.000,00
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
 1. Penyediaan Jaringan Internet Kantor Wali Nagari Rp. 4.120.000,00

III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
 1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) Rp. 40.951.500,00
 Pada kegiatan untuk menambah kegiatan HUT RI antar Nagari semula Anggarannya Rp. 1.000.000. menjadi Rp. 2.000.000
 2. Pemeliharaan Sapras Kebudayaan dan Keagamaan Rp. 10.500.000,00.-
2. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
 1. Pembinaan Lembaga Adat Rp. 2.015.500,00.-
 2. Pembinaan LPMD Rp. 4.175.000,00.-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari :
 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Rp. 79.431.500,00.-
 2. Peningkatan Ketahanan Pangan (Penyediaan Bibit Jagung) Rp. 16.814.400,00.-
 3. Pelatihan Kelompok Tani (Pembuatan Pupuk Kompos) Rp. 23.964.000,00.-
 4. Pembangunan Saluran Irigasi (Irigasi Banda Sawah Iseh) Rp. 116.639.000,00.-
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kepala Desa
 1. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari Rp. 7.300.000,00.-
 Pada Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Wali Nagari,

Perangkat Nagari serta Bamus menambahkan kegiatan :

1. Sosialisasi Hukum dan Peraturan Perundang2an
2. Pelatihan Perencanaan Penganggaran
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
 1. Pemberdayaan TP-PKK Nagari Rp. 10.000.000,00
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) :
 1. Pengembangan Saprasi Usaha Micro Rp. 27.742.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari :

Sub Bidang Penanggulangan Bencana :

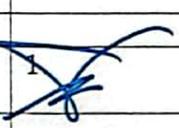
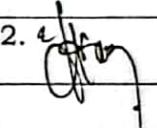
 2. Penanganan Keadaan Darurat Bencana Rp. 1.500.000,00
 2. Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak Kegiatan Bantuan Langsung Tunai /BLT Rp. 73.800.000,00
Untuk kegiatan penambahan pemanfaat BLT di koordinasikan lagi dengan DPMDPPKB

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan Perubahan APB Nagari Sungai Sariak Lumbo Tahun Anggaran 2023 di anggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.264.680,00.- dan Belanja sebesar Rp.1.277.423.706,11.- sehingga terjadi Defisit anggaran sebesar Rp. (12.742.855,11.-) selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 12.742.855,11.- sehingga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Sungai Sariak Lumbo

Salido, 05 September 2023

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP NIP. 19850612 200412 2 001	Camat	Ketua	1. 
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Wakil Ketua	2. 
3.	RYAN HANGGARA, S.IP NIP. 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	3. 
4.	LISMAWATI, SE NIP. 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	4. 
5.	ZULMADENTI, S.Ag NIP. 19780310 2008-1 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	5. 
6.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md NIP. 19850922 201101 015	Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan	Anggota	6. 